



Article Informations  
Corresponding Email:  
fadiaseptiani09@gmail.com

Received: 28/07/2025; Accepted:  
25/09/2025; Published: 15/10/2025

## **KOLABORASI OIC DAN UNHCR DALAM MENANGANI PELANGGARAN HAM DI AFGHANISTAN 2021-2023**

**Fadia Septiani**

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

### **Abstrak**

Artikel ini menganalisis kolaborasi *Organization of Islamic Cooperation* (OIC) dan *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR) yang berkembang dan berlangsung selama 2 dekade terakhir. Salah satu contoh kolaborasi keduanya adalah dalam menangani pelanggaran HAM di Afghanistan pada tahun 2021-2023 yang mana respon keduanya meningkat dikarenakan pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban pada tahun 2021. Metode pada penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus, serta analisis dokumen dan literatur yang relevan dengan teknik pengumpulan data wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kolaborasi yang dilakukan OIC dan UNHCR dalam menangani pelanggaran HAM yang terjadi di Afghanistan pada tahun 2021-2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi tersebut telah memberikan peningkatan dalam pengurangan pelanggaran HAM di Afghanistan. Namun dalam penelitian ini terdapat tantangan yang dihadapi oleh kedua organisasi dalam merealisasikan bentuk kolaborasi, termasuk perbedaan hukum aturan dan adat dengan Tabliban.

**Kata Kunci:** Kolaborasi, OIC, UNHCR, HAM, Afghanistan

### **Abstract**

*This article analyzes the collaboration between the Organization of Islamic Cooperation (OIC) and the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) has developed and continued over the past two decades. One example of their collaboration is in addressing human rights violations in Afghanistan from 2021 to 2023, where their response intensified due to the Taliban's takeover of power in 2021. The research method used in this study is qualitative, employing a case study approach, along with document and literature analysis, utilizing interview techniques for data collection. This study aims to analyze the form of collaboration between the OIC and UNHCR in addressing human rights violations in Afghanistan from 2021 to 2023. The*

*results of this study indicate that this collaboration has led to a reduction in human rights violations in Afghanistan. However, this study also identifies challenges faced by both organizations in implementing this collaboration, including differences in legal regulations and customs with the Taliban.*

**Keywords:** Collaboration, OIC, UNHCR, HAM, Afghanistan

## **1. PENDAHULUAN**

*Organization of Islamic Cooperation (OIC) dan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) telah berkolaborasi selama 2 dekade, hubungan ini didorong adanya kepentingan dalam menangani berbagai krisis kemanusiaan (Organization of Islamic Cooperation (OIC) 2020). OIC, yang didirikan pada tahun 1969 sebagai representasi politik di negara-negara Muslim, sedangkan UNHCR berdiri sejak 1950 sebagai badan PBB yang berfokus pada perlindungan pengungsi, bahkan telah menjadi badan pengungsi terbesar di dunia bahkan telah memperkerjakan lebih dari 87% anggota staff berbasis lapangan dan beroperasi di 128 negara (Ahmed 2017). Kerjasama antara OIC dan UNHCR meningkat sejak adanya kesepakatan pada bulan November 2014 melalui perencanaan membangun komite bersama dalam meningkatkan kerjasama. Kerjasama antara OIC dan UNHCR semakin diperluas dalam merespon berbagai krisis kemanusiaan termasuk situasi di Afghanistan pasca-pengambilalihan kembali kekuasaan oleh Taliban pada tahun 2021 (Rizki Maulana 2023).*

Konteks krisis kemanusiaan di Afghanistan berawal sejak peristiwa penting di awal abad ke-21. Serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat menjadi titik yang signifikan, pemerintah AS mengidentifikasi bahwa jaringan Al-Qaeda sebagai pelaku utama dalam serangan yang terjadi (Anugerah 2022). Secara bersamaan terjadi pemberontakan oleh rezim Taliban kepada pemerintahan muhajirin di Afghanistan, Studi dokumen resmi pemerintah AS mengindikasikan bahwa rezim Taliban secara konsisten memberikan perlindungan dan fasilitas pendukung bagi keberlangsungan organisasi Al-Qaeda.

AS dan sekutu NATO-nya kemudian meluncurkan “*Operation Enduring Freedom*” yang bertugas untuk memusnahkan terorisme salah satunya Taliban (Ahmad 2021). Misi kontra-terorisme itu mencapai keberhasilan dan sejak saat itu, AS menetap di Afghanistan dengan tujuan membantu mengatasi pembentukan pemerintahan baru dan pelatihan militer serta mencegah kembalinya rezim-rezim Taliban. Selama berada di Afghanistan, AS memberikan bantuan pembangunan berbagai sektor seperti pendidikan, pertanian, dan infrastruktur. Di sisi lain, perginya Taliban bukanlah kehancuran bagi Taliban itu sendiri, justru hal tersebut merupakan awal kebangkitan Taliban yang secara diam-diam kembali menyebarkan rezimnya bahkan membentuk sebuah aliansi Taliban-ISIS (Ashghor 2021).

Pada tahun 2014, misi kontra-terorisme AS dan sekutu NATO-nya selesai dan setelah berhasil membunuh Osama Bin Laden yang merupakan pemimpin Al-Qaeda (Safira, Harza, and Jamilah 2023). Mengetahui bahwa Taliban kembali muncul, AS dan Taliban sepakat untuk melakukan perundingan untuk mengkonfirmasi kelanjutan posisi AS di Afghanistan. Selanjutnya, terjadi perjanjian Doha diantara keduanya. Perjanjian tersebut memiliki salah satu klausul penting yang mewajibkan AS menarik seluruh pasukannya dari Afghanistan dan Taliban memberhentikan aksi pelanggarannya. Namun, setelah perjanjian itu disepakati, Taliban melakukan tindakan kooperatif dikarenakan telah terjadi ledakan di bandara Kabul yang sedang terjadi mobilisasi pasukan AS, terjadi serangan di ibukota Kabul, bahkan beberapa pemberontakan yang dilakukan di istana kepresidenannya.

Pada akhirnya AS menarik seluruh pasukan militernya yang tersisa sekitar 3.500 dari Afghanistan pada tahun 2021 hal tersebut disebabkan AS sudah terlalu banyak dalam membantu Afghanistan baik secara finansial maupun non-finansial (Berlianto 2021). Penarikan pasukan ini baru terealisasikan di era kepemimpinan Biden dikarenakan pada saat itu bertepatan dengan terjadinya pandemi Covid-19. Pandemi ini membuat AS memiliki kepentingan prioritas nasional (Boy Anugerah

and Jabinson Purba 2021). Penarikan seluruh pasukan AS memberikan peluang bagi Taliban untuk kembali merebut pemerintahan Afghanistan yang semula berhasil dikendalikan oleh AS. Banyak pelanggaran HAM menurut kaca mata hukum internasional yang dilakukan oleh Taliban, khususnya bagi perempuan dan anak perempuan (Boy Anugerah and Jabinson Purba 2021). Taliban memberlakukan hukum yang kejam seperti cambuk, amputasi anggota badan, dan eksekusi publik yang dinilai melanggar hak asasi manusia Terdapat batasan-batasan yang diberikan dalam bekerja, pendidikan, bahkan bersosialisasi. Selain itu, hukum cambuk dan batasan untuk memulai pemberitaan dan interaksi dengan negara-negara lain terutama yang memiliki perbedaan keyakinan (Boy Anugerah and Jabinson Purba 2021). Kondisi inilah yang memicu respons organisasi internasional seperti OIC dan UNHCR.

## **2. PEMBAHASAN**

### **Bentuk Kolaborasi OIC-UNHCR**

Menanggapi isu mendesak pada saat itu, OIC mengambil inisiatif dengan memberikan serangkaian resolusi untuk Afghanistan termasuk pendekatan mengenai hak-hak manusia terutama hak bagi perempuan. Untuk mendukung implementasinya, OIC pastinya membutuhkan badan penggerak dalam kerja lapangan juga bantuan pendanaan dan kolaborasi dengan lembaga internasional seperti PBB. Hal ini mendorong berbagai badan dibawah naungan PBB untuk mulai melakukan kerjasama dengan OIC. Salah satu organisasi PBB yang terlibat pada konflik Afghanistan ini adalah UNHCR yang berfokus pada perlindungan pengungsi.

OIC telah melakukan berbagai cara untuk memeberikan langkah bantuan Afghanistan, *Afghanistan Humanitarian Trust Fund* (AHTF). OIC dan UNHCR telah membangun kemitraan strategis untuk menangani pelanggaran HAM dan krisis kemanusiaan di Afghanistan, dengan fokus pada peningkatan ketahanan dan kemandirian masyarakat. Salah satu bentuk nyata kolaborasi ini adalah pembentukan Afghanistan Humanitarian Trust Fund (AHTF), sebuah inisiatif pendanaan yang bertujuan menyediakan bantuan kemanusiaan berbasis kebutuhan. Melalui AHTF, OIC dan UNHCR menjalankan tiga program utama yang

mencakup pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Dalam sektor pendidikan, misalnya, mereka membangun SMART Hubs di berbagai provinsi untuk memastikan akses pembelajaran bagi anak-anak, termasuk perempuan yang sering kali menghadapi pembatasan di bawah pemerintahan Taliban. Di bidang kesehatan, proyek-proyek kolaboratif difokuskan pada penyediaan layanan dasar di daerah-daerah dengan populasi pengungsi tinggi. Sementara itu, program pemberdayaan ekonomi memberikan pelatihan keterampilan dan modal usaha, khususnya bagi perempuan, untuk mendorong kemandirian finansial (Septiani 2025).

Hasil konkret dari kolaborasi ini terlihat dari peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi ratusan ribu warga Afghanistan, serta terbukanya peluang ekonomi bagi kelompok rentan. Namun, tantangan seperti ketidakstabilan politik dan keterbatasan pendanaan masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, OIC dan UNHCR terus berupaya memperluas jaringan mitra dan meningkatkan transparansi pengelolaan dana agar bantuan dapat disalurkan secara lebih efektif. Kolaborasi ini tidak hanya menunjukkan peran penting lembaga internasional dalam penanganan krisis, tetapi juga membuktikan bahwa pendekatan berbasis keagamaan dalam hal ini melalui OIC dapat menjadi sarana efektif untuk memobilisasi sumber daya dan dukungan global bagi Afghanistan.

Kolaborasi ini memadukan **soft power** OIC dengan **hard power** UNHCR. AHTF berfungsi sebagai **mekanisme pendanaan terkoordinasi**, mengurangi tumpang-tindih program. Misalnya, proyek kesehatan di 6 provinsi Afghanistan didanai bersama oleh OIC (*via Saudi Fund for Development*) dan UNHCR. OIC memberikan **akses politik** ke wilayah konflik, sementara UNHCR memperkuat legitimasi OIC di forum PBB melalui laporan HAM berbasis data. OIC cenderung menghindari konfrontasi dengan Taliban demi stabilitas, sementara UNHCR konsisten menuntut pertanggungjawaban. Menurut data wawancara yang peneliti lakukan dengan *OIC General Secretariat Professional Officer*, yang menyatakan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Taliban di Afghanistan bukanlah

sebuah pelanggaran melainkan semata-mata sebuah hukum dan aturan yang memang terjadi di dalam agamanya.

Selama periode 2021 hingga 2023, kolaborasi antara Organisasi Kerja Sama Islam (OIC) dan UNHCR menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam upaya memberikan bantuan kemanusiaan di Afghanistan. Pemerintah Taliban menerapkan kebijakan yang sangat ketat, termasuk menolak sebagian bantuan luar negeri dan intervensi yang mereka anggap sebagai bentuk campur tangan terhadap kedaulatan Afghanistan. Akibatnya, OIC dan UNHCR mengalami kesulitan dalam mendistribusikan bantuan, bahkan dalam upaya advokasi hak asasi manusia berdasarkan hukum internasional.

Taliban meyakini bahwa kebijakan mereka merupakan kewajiban yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam, sesuai dengan perspektif yang mereka anut. Di sisi lain, OIC hadir di Afghanistan dengan tujuan mendukung kebebasan kelompok Muslim di negara tersebut. Sementara itu, UNHCR menghadapi kendala lebih besar, khususnya dalam melakukan dialog langsung dengan Taliban akibat sentimen anti-Barat yang kuat. Pemerintah Taliban memandang negara-negara Barat sebagai pihak yang berusaha mengintervensi urusan domestik Afghanistan, sehingga menghambat proses diplomasi dan koordinasi kemanusiaan.

Meskipun menghadapi tantangan, kolaborasi antara OIC dan UNHCR tetap menunjukkan hasil signifikan. Salah satunya keberhasilan nyata adalah distribusi bantuan kemanusiaan langsung. Termasuk pasokan makanan, air bersih, dan akses pendidikan bagi kelompok rentan. Dengan memadukan legitimasi kultural OIC yang memungkinkan pendekatan berbasis nilai-nilai Islam untuk diterima oleh masyarakat lokal. Melalui konsep *iterated interactions* berhasil menciptakan mekanisme koordinasi yang stabil antara OIC dan UNHCR, meskipun harus beroperasi dalam lingkungan politik Afghanistan yang sangat kompleks. Implementasi konsep ini terlihat jelas melalui pembentukan AHTF yang berfungsi sebagai platform pendanaan bersama bagi program-program kemanusiaan. Selain itu, OIC dan UNHCR menetapkan aturan pendistribusian bantuan berbasis komunitas, termasuk program

pendidikan darurat dan kesehatan yang menjadi efektivitas dalam penerapan *rules and regimes*. Selain itu, bantuan langsung untuk korban berbentuk tunai maupun logistik, walaupun bantuan-bantuan itu seringkali tidak menyentuh akar masalah seperti diskriminasi sistem terhadap perempuan, namun terdapat perubahan konkret di lapangan. Kolaborasi OIC-UNHCR menciptakan aturan dan rezim tetapi efektivitasnya dibatasi oleh lingkungan politik Afghanistan dan fragmentasi kebijakan. Upaya lebih berhasil dalam mitigasi darurat ketimbang perubahan struktural, mengingat resistensi terhadap reformasi HAM.

Secara operasional, AHTF menetapkan pembagian peran yang jelas dimana OIC bertugas memobilisasi sumber daya politik dan finansial dari negara-negara anggota, sementara UNHCR bertanggung jawab atas implementasi teknis di lapangan dengan dukungan Islamic Development Bank sebagai pengelola keuangan (Anon 2023). Kerangka kerja ini diperkuat oleh dasar hukum berupa Resolusi Dewan Menteri Luar Negeri OIC dan mandat UNHCR yang memberikan legitimasi formal terhadap operasi AHTF. Namun, aturan dan rezim yang diterapkan tidak efektifitas tersalurkan kepada Afghanistan yang memiliki kebijakan dan sistem pemerintah *de facto* oleh Taliban yang tidak ingin intervensi apapun dari pihak luar.

Dalam praktiknya, AHTF mengadopsi prinsip-prinsip kemanusiaan internasional seperti *do no harm* dan *humanitarian neutrality*, meskipun penerapannya menghadapi tantangan serius akibat pembatasan yang diberlakukan Taliban terhadap pekerja kemanusiaan. Mekanisme monitoring yang ketat dan sistem pelaporan berkala dikembangkan untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana, termasuk alokasi prioritas untuk sektor perlindungan perempuan dan bantuan pangan. Kasus AHTF ini menunjukkan bagaimana rezim internasional dapat menciptakan kerangka kerja sama yang stabil melalui institusionalisasi aturan dan norma, sekaligus mengungkap keterbatasannya ketika berhadapan dengan aktor non-kooperatif seperti Taliban.

### **3. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara OIC dan UNHCR melalui AHTF telah memberikan dampak signifikan dalam penanganan krisis kemanusiaan di Afghanistan. Inisiatif ini berhasil meningkatkan akses pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang ekonomi bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Meskipun menghadapi tantangan seperti ketidakstabilan politik dan keterbatasan pendanaan, kerja sama ini menunjukkan bahwa pendekatan multilateral berbasis keagamaan dapat menjadi solusi efektif dalam respon kemanusiaan. Keberhasilan program ini juga menegaskan pentingnya sinergi antara organisasi internasional dan lembaga berbasis agama untuk mendorong pemulihan berkelanjutan di negara-negara konflik seperti Afghanistan. Dengan demikian, kolaborasi OIC-UNHCR tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi bagi kemandirian masyarakat di masa depan.

## **REFERENSI**

- Ahmad. 2021. "Taliban: Kronologi 20 Tahun Invasi Pasukan Amerika Di Afghanistan." *16 Agustus 2021*. Retrieved (Operation Enduring Freedom).
- Ahmed, Fethi B. Jomaa. 2017. "Rethinking UNHCR and OIC Response to Forced Migration." *Al-Shajarah: Journal of Islamic Thought and Civilization* 22 (1):147-70.
- Anon. 2023. "Promoting Resilience and Self-Reliance in Afghanistan 2023."
- Anugerah, Boy. 2022. "Krisis Afghanistan Dan Implikasi Terhadap Politik Global." *School of Government and Public Policy Indonesia* 9(3):1-4. doi: 10.13140/RG.2.2.17501.90085.
- Ashghor, Aly. 2021. "Taliban Di Afghanistan: Tinjauan Ideologi, Gerakan Dan Aliansinya Dengan ISIS (Taliban in Afghanistan: Overview of Its Ideology, Movement and Alliance with ISIS)." *Jurnal Keamanan Nasional* 7(1):71-83.
- Berlianto. 2021. "Tarik Pasukan Dari Afghanistan, AS Bersiap Hadapi Serangan Taliban." *SINDOnews.Com*.
- Boy Anugerah, and Jabinson Purba. 2021. "Kondisi Politik Dan Keamanan Afghanistan Di Bawah Rezim Taliban Dan Signifikansinya Terhadap Geopolitik Global." *Jurnal Lemhannas RI* 9(3):13-34. doi: 10.55960/jlri.v9i3.399.
- Organization of Islamic Cooperation (OIC). 2020. "OIC, UNHCR Agree on a Joint Action Plan." *07 September 2020*. Retrieved ([https://www.oic-oci.org/topic/?t\\_id=23830&t\\_ref=14167&lan=en](https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=23830&t_ref=14167&lan=en)).
- Rizki Maulana. 2023. "Respon OIC Terhadap Kebijakan Taliban Di Afghanistan Pasca-2021: Analisis Resolusi 10/49-P." *Jurnal Studi*

*Keamanan Dan Global (Universitas Indonesia).*

Safira, Fifi, Zulkifli Harza, and Mariam Jamilah. 2023. "Kebijakan Penarikan Pasukan Amerika Serikat Dari." 02(02):54-71.

Septiani, Fadia. 2025. "Wawancara Dengan Hon Dr. Yasmi Adriansyah Tentang Kolaborasi OIC-UNHCR Dalam Menangani Pelanggaran HAM Di Afghanistan 2021-2023."